

PRAKTIK PENDIDIKAN DEMOKRASI DI SMAN 4 BOJONEGORO DALAM MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS

Alfa Nur Rohmah

14040254050 (Prodi S1 PPKn, FISH, UNESA) alfanur.an@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (Prodi S1 PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pendidikan demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dalam membentuk warga negara yang demokratis yang dilihat melalui proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yakni Kepala Sekolah, guru PPKn, pembimbing ekstrakurikuler dan pembina OSIS serta siswa dalam pembelajaran, anggota ekstrakurikuler dan pengurus OSIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendidikan demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan pembelajaran PPKn dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nilai-nilai pendidikan demokrasi yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yakni peduli, ramah, toleransi dan kerjasama. Praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler olimpiade wawasan kebangsaan dan praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan intrakurikuler Organisasi Siswa Intra Sekolah dilihat dari partisipasi, keadilan dan kesetaraan. Partisipasi ditunjukkan dengan siswa aktif mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan. Keadilan ditunjukkan dengan proses perekrutan anggota yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kesetaraan ditunjukkan dengan tidak membedakan dalam memilih teman serta semuanya memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat.

Kata Kunci: pendidikan demokrasi, warga negara yang demokratis.

Abstract

The purpose of this research to describe the practices of educational democracy in SMAN 4 Bojonegoro in the form of a democratic citizen is seen through the learning process and school events. The which theory used in this research is a social construction theory by Peter L. Berger and Thomas Luckmann. This research used the qualitative approach with a descriptive method. Using data collection techniques interviews, observation and documentation. Informant in this research amounts thirteen peoples are headmaster, teacher of civic education, extracurricular counselor and builder of Intra School Student Organization, students in learning, extracurricular members and board of Intra School Student Organization. The result showed that practices democracy in education SMAN 4 Bojonegoro implemented through learning activities, extracurricular and intracurricular. The practice of educational democracy in civic education learning activities is carried out in accordance with the plan of implementation of the learning. Educational values of democracy that is listed in the plan of implementation of the study are caring, friendly, tolerance and cooperation. The practice of educational democracy in extracurricular activities of Olympic Insight nationality and education practice democracy in the activities of the student Intra School Student Organization seen from participation, justice and equality. Participation demonstrated by active students follow all activities. Justice is represented by a member of the recruitment process is carried out in accordance with their respective capabilities. Equality is demonstrated with students does not discriminate in choosing friends and all have equal rights is included in the stated opinions.

Keywords: democracy education, democartic society.

PENDAHULUAN

Suatu negara pasti memiliki sistem politik yang merupakan gambaran bagaimana proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak terlahir sebagai negara

merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menetapkan untuk menganut sistem politik demokrasi. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem politik demokrasi ini tidak hanya berlaku pada

bidang politik saja, namun juga pada seluruh bidang kehidupan masyarakat seperti bidang sosial, hukum maupun ekonomi.

Menurut seorang pemikir politik, Diane Ravitch (dalam Zamroni, 2013:104), demokrasi adalah suatu proses, suatu cara untuk hidup bersama dan bekerja sama. Demokrasi memerlukan kerjasama dan toleransi di kalangan warga masyarakat dan berbagai kelompok yang ada. Demokrasi memberikan kebebasan dan sekaligus menuntut tanggung jawab dari setiap warga masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam demokrasi, kebebasan tidak bersifat absolut melainkan memiliki keterbatasan. Batas kebebasan demokrasi adalah tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Demokrasi memberikan kesempatan warga masyarakat untuk mengambil peran dan berpartisipasi dalam penentuan aturan atau pedoman bagi masyarakat. Sehingga, demokrasi akan berjalan dengan baik apabila seluruh warga masyarakat mampu berpartisipasi dalam menentukan pendapat, berkelompok dan menjalankan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang baik dalam demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan warga masyarakat agar hidup dalam sistem dan tatanan demokrasi maka diperlukan pengembangan kultur demokrasi melalui pendidikan demokrasi. Melalui pendidikan demokrasi, masyarakat diajak untuk memahami bagaimana proses demokrasi sekaligus peran apa yang harus dilakukan dalam proses demokrasi guna mencetak generasi muda yang demokratis.

Pendidikan sangat penting dilakukan guna mencetak warga negara yang demokratis. Pendidikan demokrasi akan lebih efektif bila dilakukan sejak dini di sekolah. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengisyaratkan bahwa pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan secara demokratis.

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis guna membentuk warga negara yang demokratis. Hal tersebut berarti bahwa Undang-Undang sudah mengamanatkan agar pendidikan di Indonesia ini mampu membentuk dan mengarahkan siswa agar menjadi warga negara yang demokratis. Oleh sebab itu, pendidikan yang ada di Indonesia harus diselenggarakan secara demokratis guna mempersiapkan siswa agar ketika nanti terjun di masyarakat dapat menjadi warga negara yang demokratis.

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri atau bisa disebut sekolah sebagai *mini society* yang berarti masyarakat kecil. Berarti apa yang ada di masyarakat harus ada pula di sekolah. Kalau di masyarakat ada Undang-undang dan peraturan maka di

sekolah ada aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Kalau di masyarakat ada pemimpin seperti presiden, gubernur maupun bupati, maka di sekolahpun ada kepala sekolah yang memimpin. Artinya apa yang ada di masyarakat sebenarnya juga ada di sekolah.

Pendidikan demokrasi adalah suatu proses dimana siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan sekolah (Zamroni, 2013:22). Sekolah dapat dirancang sebagai laboratorium demokrasi agar pelaksanaan praktik pendidikan demokrasi dapat berjalan lebih maksimal, dimana sekolah ini dapat dijadikan wadah belajar berdemokrasi bagi siswa. Pendidikan demokrasi sangat dibutuhkan di sekolah untuk membentuk warga negara yang demokratis, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi yang mengharuskan seluruh warganya untuk menerapkan praktik pendidikan demokrasi dalam kehidupannya.

Di tingkat sekolah, pendidikan demokrasi dapat diintegrasikan dalam kurikulum dalam bentuk pembelajaran di kelas maupun kegiatan di luar pembelajaran (Nastiti, 2016:284). Mata pelajaran yang di dalamnya jelas mengandung nilai dan materi tentang pendidikan demokrasi adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sedangkan untuk kegiatan di luar pembelajaran, dikembangkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang dapat memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Dengan pembelajaran demokrasi di sekolah akan menjadikan sekolah sebagai lingkungan sekolah yang demokratis, dan melibatkan siswa dalam kegiatan yang menggambarkan keadaan masyarakat pada umumnya.

John Dewey (dalam Zamroni, 2013:21) menyatakan bahwa, sekolah bukanlah tempat untuk mempersiapkan siswa bagi kehidupan, melainkan sekolah adalah kehidupan siswa itu sendiri. Artinya sekolah bukan tempat untuk mempersiapkan siswa ketika nanti terjun di masyarakat, melainkan kehidupan di sekolah itu harus dianggap seperti kehidupan nyata seperti di masyarakat. Dalam kaitan dengan peran dan tugas sekolah, pendapat John Dewey sangat penting. Dewey (dalam Zamroni, 2013:145) menyatakan bahwa :

“Tugas sekolah dalam kaitan mengembangkan warga negara yang baik untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis adalah mengembangkan pada diri siswa daya kritis, kemampuan untuk mempertanyakan, dan kesadaran bahwa mereka tidak hidup sendiri melainkan hidup bersama dalam masyarakat.”

SMAN 4 Bojonegoro atau SMAPA merupakan sekolah yang berada di Jl. AKBP. M. Suroko No. 30 Bojonegoro. Sekolah ini merupakan sekolah yang telah terakreditasi A yang menerapkan sistem *full day school*.

Sekolah ini telah mengajarkan siswa untuk berdemokrasi sejak dini seperti adanya Pemilihan Ketua OSIS. Namun ada hal yang berbeda dalam Pemilihan Ketua OSIS di sekolah ini. Menurut beritabojonegoro.com, konsep pemilihan OSIS disini memakai konsep pemilu raya seperti pemilihan Gubernur beberapa waktu yang lalu. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Dra. Wahyuniati, M.Pd yang menyatakan bahwa :

“Konsep pemilihan calon ketua OSIS sengaja dibuat seperti konsep pemilihan umum dengan tujuan agar para siswa juga merasakan secara riil seperti proses pemilihan di masyarakat, sehingga ketika di masyarakat para siswa ini sudah terbiasa. Hal tersebut juga sebagai bekal siswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa yang sebentar lagi atau bahkan sudah bisa mengikuti proses pemilihan umum. Selain itu untuk menunjukkan bahwa SMA/PA sebutan SMAN 4 Bojonegoro tidak hanya dikenal dengan sisi seninya seperti band dan musik, tetapi juga dapat menunjukkan sisi kemasyarakatan yang nyata dalam kehidupan dalam bentuk pesta demokrasi di sekolah. Karena selama ini, SMA/PA lebih dikenal unggul dalam bidang seninya dengan band dan musik.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2017)

Selain itu, sekolah ini memiliki visi unggul dalam prestasi, berdisiplin, peduli lingkungan serta berakhlak mulia. Visi sekolah ini jika dikaitkan dengan ciri-ciri demokrasi sangatlah berhubungan, dimana visi yang ada di sekolah ini merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi memiliki ciri *liberty* (kebebasan yang bertanggung jawab), *equality* (kesetaraan), dan *fraternity* (kepedulian). Visi sekolah jika dikaitkan dengan ciri demokrasi maka di dalamnya telah mengandung ciri-ciri demokrasi.

Kebebasan yang bertanggung jawab (*liberty*) diwujudkan dengan sekolah memberikan kebebasan kepada siswanya untuk memilih minimal salah satu ekstrakurikuler yang disukai dan maksimal 3 ekstrakurikuler yang jadwalnya tidak berbenturan serta berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kejujuran (*equality*) diwujudkan melalui kedisiplinan dengan mematuhi aturan yang ada di sekolah maka akan mengajarkan kejujuran dalam diri siswa. Kepedulian (*fraternity*) diwujudkan melalui kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar karena sekolah ini sudah menjadi sekolah adiwiyata yang menuntut seluruh siswa untuk peduli, mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan sekitar.

Pentingnya pendidikan demokrasi di sekolah ini, juga untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Dalam visi dan misi sekolah di dalamnya telah terdapat karakter-karakter seperti peduli lingkungan, kejujuran dan kebebasan yang bertanggung jawab yang merupakan bagian dari ciri-ciri

pendidikan demokrasi. Maka untuk mencapai visi dan misi sekolah, pendidikan yang diselenggarakan di sekolah ini dikemas melalui pendidikan yang demokratis untuk membentuk sikap demokratis dalam diri siswa. Kaitannya pendidikan demokrasi dengan visi dan misi sekolah ini yakni diharapkan dengan pendidikan demokrasi dapat menjadikan siswa menjadi lebih bijaksana dalam memaknai setiap peristiwa yang ada di lingkungan sekitar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji praktik pendidikan demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro yang dilihat melalui proses pembelajaran dan kegiatan sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler di sekolah tersebut. Maka dapat ditarik rumusan masalah yakni bagaimana praktik pendidikan di SMAN 4 Bojonegoro dalam membentuk warga negara yang demokratis yang dilihat melalui proses pembelajaran dan kegiatan sekolah.

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang demokrasi khususnya praktik pendidikan demokrasi di sekolah. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat dikomunikasikan secara umum agar dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi sekolah untuk mengambil kebijakan tentang praktik pendidikan demokrasi di sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penggunaan metode ini dikarenakan ingin menjabarkan, menggambarkan dan mendeskripsikan secara objektif tentang proses praktik pendidikan demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro secara apa adanya. Penelitian ini dilakukan di SMAN 4 Bojonegoro yang berlokasi di Jalan AKBP. M. Suroko No. 30 Bojonegoro. Lokasi tersebut dipilih karena telah memenuhi kriteria penelitian yang dapat mendukung penelitian agar berjalan dengan baik.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan menggunakan *key informan*. Informan kunci dalam penelitian ini yakni Kepala Sekolah SMAN 4 Bojonegoro dikarenakan kepala sekolah merupakan pemimpin dan pengelola sekolah yang lebih mengetahui tentang pelaksanaan praktik pendidikan di sekolah secara lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Untuk memeriksa keabsahan data maka digunakan teknik triangulasi sumber, dimana data diperoleh dari sumber yang berbeda-beda namun tetap dengan teknik yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pendidikan Demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dalam Kegiatan Pembelajaran

Praktik pendidikan demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dapat melalui kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada mata pelajaran PPKn yang di dalamnya memuat nilai-nilai dan praktik pendidikan demokrasi. Praktik pendidikan demokrasi pada mata pelajaran PPKn dapat dilihat pada saat pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan saat pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan hasil dokumentasi pada tanggal 23 April 2018 terhadap perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru PPKn SMAN 4 Bojonegoro yakni Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn kelas X semester 2 materi tentang wawasan nusantara. Dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut dapat dilihat bahwa di dalamnya memuat nilai dan praktik pendidikan demokrasi. Nilai pendidikan demokrasi yang tercantum dalam RPP adalah peduli, ramah, toleransi dan kerjasama. Nilai tersebut tercantum dalam Tujuan Pembelajaran, sebagai contoh :

“Setelah mempelajari materi maka diharapkan siswa mampu memahami tentang wawasan nusantara.”

(Adiwiyata → peduli, ramah, toleransi dan kerjasama)

(Dikutip dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn kelas X semester 2 tentang wawasan nusantara)

Beberapa karakter yang dicantumkan di atas merupakan wujud dari nilai pendidikan demokrasi.

Peduli merupakan salah satu nilai yang diajarkan dalam pendidikan demokrasi. Peduli berarti suatu sikap untuk melibatkan diri terhadap persoalan atau keadaan yang ada di sekitar kita. Dalam praktik pendidikan demokrasi, peduli merupakan salah satu sikap yang harus diajarkan kepada siswa. Sesuai dengan yang ada dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran maka sikap peduli ini akan diajarkan oleh guru PPKn di sekolah ini, selain itu dikarenakan SMAN 4 Bojonegoro merupakan sekolah adiwiyata yang mewajibkan seluruh siswanya untuk mengembangkan sikap kepedulian.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru PPKn Bapak Drs. Moch. Malik yang menyatakan bahwa :

“Sikap peduli menjadi hal yang terpenting diajarkan di sekolah ini karena sekolah kita kan sudah menjadi sekolah adiwiyata yang mengharuskan siswanya untuk bersikap peduli terutama peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitar.” (Wawancara tanggal 23 April 2018)

Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan pernyataan dari guru PPKn juga yakni Bapak Drs. Mohadi, M.Pd yang menyatakan :

“Sikap peduli tidak hanya diajarkan pada kelas X saja baik kelas XI maupun XII semuanya tetap

diajarkan untuk bersikap peduli terhadap lingkungan sekitar karena sikap ini menjadi sikap yang terpenting di sekolah ini karena sekolah ini sudah menjadi sekolah adiwiyata.” (Wawancara tanggal 3 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa guru PPKn di sekolah ini telah mengajarkan praktik pendidikan demokrasi yakni sikap peduli. Sikap peduli dalam pembelajaran diwujudkan dengan siswa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya, sebagai sekolah adiwiyata maka sekolah ini mengharuskan seluruh siswanya agar peduli terhadap kelestarian lingkungan yang dibutikan dengan merawat lingkungan agar senantiasa bersih dan hijau, membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya, menjaga kebersihan kelas agar pembelajaran menjadi nyaman. Di sekolah ini sampah dipilah berdasarkan jenisnya masing-masing, jadi sekolah ini menyediakan empat tempat sampah dengan jenis yang berbeda-beda. Jadi siswa harus membuang sampah pada tempatnya berdasarkan jenisnya masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran pada tanggal 23 April 2018 terlihat bahwa sikap peduli yang diterapkan oleh guru, yakni saat mulai pembelajaran, guru masuk kelas dengan mengucapkan salam kemudian duduk di kursi guru, guru tidak langsung memulai pembelajaran namun melihat ke sekeliling kelas untuk memastikan apakah kelas dalam kondisi bersih dan nyaman untuk proses pembelajaran. Ketika kelas dalam keadaan bersih maka guru akan memulai pembelajaran namun ketika dalam kelas masih ada sampah maka guru akan diam terlebih dahulu dan ketika guru tidak segera memulai pembelajaran maka siswa akan merasa dan segera membuang sampah ke tempat sampah. Ketika kelas sudah dalam kondisi bersih dan nyaman untuk proses pembelajaran, maka guru akan segera memulai pembelajaran.

Hal tersebut biasa diterapkan guru selama proses pembelajaran untuk menerapkan sikap kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Hasil observasi tersebut juga didukung berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang bernama Istiana Muzakky kelas XI IIS 3 yang menyatakan bahwa :

“Guru PPKn selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu bersikap peduli tidak hanya selama pembelajaran di kelas tetapi juga pada lingkungan sekitar, misalnya ketika pembelajaran kelas harus dalam keadaan bersih supaya nyaman ketika belajar.” (Wawancara tanggal 26 April 2018)

Wawancara dengan siswa yang bernama Rike Widyasari kelas X MIA 2 yang menyatakan bahwa :

“Ketika masuk ke dalam kelas Pak Malik selalu mengingatkan agar kita itu membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam kelas. Kan biasanya anak-anak ini kan sering membuang kayak sampah-

sampah kertas itu sembarangan di dalam kelas, nah Pak Malik itu sebelum memulai pembelajaran pasti memastikan kalau kelasnya dalam kondisi bersih.” (Wawancara tanggal 25 April 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa guru PPKn mengajarkan praktik pendidikan demokrasi dalam pembelajaran yang berupa sikap peduli yang ditunjukkan dengan peduli terhadap kelestarian lingkungan, peduli terhadap sesama teman walaupun berbeda agama maupun suku semuanya tetap dianggap sama tanpa membedakan satu sama lain.

Salah satu sikap yang diajarkan guru PPKn sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sikap ramah. Ramah merupakan salah satu nilai yang diajarkan dalam pendidikan demokrasi, dengan adanya sikap tersebut maka diharapkan siswa dapat saling menghormati dan menghargai baik sesama teman, guru, kepala sekolah maupun seluruh warga sekolah. Dengan sikap ramah yang dimiliki oleh siswa maka diharapkan dapat menjaga hubungan baik antar seluruh warga sekolah.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 23 April 2018 dapat dilihat bahwa saat proses pembelajaran di kelas guru selalu bersikap ramah dan baik kepada siswanya, selama proses pembelajaran guru selalu menanggapi apa yang ditanyakan oleh siswa tanpa membatasinya, guru menjelaskan dengan baik ketika siswa belum memahami apa yang disampaikan oleh guru. Sedangkan siswa juga selalu membantu temannya ketika ada teman yang membutuhkan bantuan seperti belum memahami apa yang disampaikan oleh guru.

Guru PPKn telah mengajarkan sikap ramah pada siswa saat proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan siswa mampu bersikap baik terhadap teman, guru maupun kepala sekolah. Siswa mampu menghormati dan menghargai dengan baik guru yang ada dalam kelas. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan guru PPKn Bapak Drs. Moch. Malik yang menyatakan bahwa :

“Sebagian besar siswa disini memiliki perilaku yang baik, siswa disini tahu bagaimana caranya bersikap baik kepada temannya maupun kepada guru yang ada disini. Siswa disini juga terbiasa untuk menghormati guru, ketika papasan dengan guru juga langsung nyapa dan cium tangan. Disini dibudayakan cium tangan dengan guru ketika bertemu di jalan baik di sekolah atau saat ketemu di jalan.” (Wawancara tanggal 23 April 2018)

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru PPKn Bapak Drs. Mohadi, M. Pd yang menyatakan :

“Siswa disini memiliki perilaku yang cukup baik dan ramah baik terhadap teman sendiri maupun guru. Kalau ketemu di jalan pasti langsung nyapa dan cium tangan, itu sudah seperti budaya disini. Kalau di kelas pun saya juga selalu bersikap baik kepada siswa, nggak pernah saya marah di kelas itu

nggak pernah kecuali kalau memang sudah kebangetan sikapnya baru saya tegur.” (Wawancara tanggal 3 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa siswa disini memiliki perilaku yang cukup baik terhadap seluruh warga sekolah misalnya ketika bertemu dengan guru di jalan dibiasakan dengan budaya cium tangan atau menyapa. Hal ini selalu dibiasakan guru yang ada disini agar seluruh siswa mampu menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah, bahkan tidak hanya di sekolah namun juga di lingkungan masyarakat.

Selain itu, ketika siswa tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh guru, maka siswa bertanya dengan guru dan dengan ramah guru akan menjelaskan kepada siswa tentang apa yang belum dipahami. Hal ini selalu dibiasakan guru PPKn agar ketika di luar pembelajaran siswa juga menerapkan hal yang sama seperti yang diajarkan oleh guru.

Wawancara dengan siswa yang bernama Istiana Muzakky kelas XI IIS 3 yang menyatakan bahwa :

“Sejak awal masuk sekolah ini kami sudah diajarkan oleh guru-guru disini untuk saling menghormati antar sesama baik dengan guru maupun teman sendiri. Terus kalau berhubungan dengan pelajaran, misal kalau ada materi yang belum jelas maka kami menanyakan langsung kepada guru dan guru itu langsung menjawab dan menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siswanya, jadi Pak Malik itu tidak pernah marah kalau kita selalu tanya-tanya terus malahan beliau senang kalau kita lebih aktif.” (Wawancara tanggal 26 April 2018)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa guru PPKn telah menerapkan praktik pendidikan demokrasi dalam pembelajaran dengan mengajarkan sikap ramah kepada siswanya. Hal ini dimaksudkan agar ketika terjun di lingkungan masyarakat siswa terbiasa menerapkan sikap tersebut. Karena sikap ramah ini juga merupakan bagian terpenting dalam pendidikan demokrasi, dengan adanya sikap ini maka diharapkan siswa dapat menghargai dan menghormati orang lain tanpa membedakan-bedakannya.

Toleransi merupakan sikap yang sangat penting diajarkan dalam pendidikan demokrasi. Toleransi merupakan sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi suatu perbedaan dan hak-hak yang dimiliki individu. Setiap individu memiliki hak masing-masing seperti hak untuk berpendapat, berkelompok, maupun memeluk agamanya masing-masing. Oleh karena perbedaan yang terjadi maka siswa diharapkan dapat memiliki sikap toleransi yang diajarkan oleh guru yang nantinya akan juga diterapkan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran PPKn pada tanggal 23 April 2018 yakni selama proses pembelajaran guru tidak pernah membedakan siswa dalam satu kelas, seperti dalam hal

menyampaikan pendapat semua siswa ketika ada yang mengacungkan tangan untuk menyampaikan pendapat maka guru akan memberikan kesempatan kepada semuanya tanpa terkecuali tanpa memandang apakah siswa tersebut berasal dari agama maupun suku yang berbeda. Ketika ada siswa yang menyampaikan pendapat makasiswa yang lain juga mendengarkan dengan baik dan menghargai pendapat temannya tidak ada yang menertawakan pendapat dari temannya semua menghargai walaupun pendapatnya berbeda-beda.

Guru PPKn di sekolah ini juga mengajarkan sikap toleransi dalam pembelajaran sesuai dengan yang dicantumkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini dibuktikan dengan ketika pembelajaran siswa diajarkan untuk tidak membedakan teman yang berbeda dengan dirinya baik dalam hal agama, suku maupun ras semuanya harus dianggap sama. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan siswa yang bernama Rike Widyasari kelas X MIA 2 yang menyatakan bahwa :

“Saya tidak pernah membedakan dalam memilih teman di kelas termasuk ketika membuat kelompok belajar di kelas tidak membedakan walaupun berasal dari keyakinan yang sama atau berbeda.” (Wawancara tanggal 25 April 2018)

Wawancara dengan siswa yang bernama Aris Maulana kelas X MIA 2 yang menyatakan :

“Guru juga tidak pernah membedakan antar siswa yang ada di kelas, semuanya dianggap sama entah dari agama yang sama maupun berbeda semuanya diperlakukan sama tidak ada perbedaan.” (Wawancara tanggal 25 April 2018)

Guru PPKn juga tidak pernah membedakan siswanya ketika pembelajaran, semuanya dianggap sama dan berhak mendapat pelayanan yang baik dalam pendidikan tanpa peduli suku maupun agama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru PPKn Bapak Drs. Moch. Malik yang menyatakan :

“Dalam pembelajaran saya tidak pernah membedakan antar murid yang satu dengan murid lainnya berdasarkan status maupun agama yang dianutnya, melainkan saya melihat perkembangan mereka setelah menerima pembelajaran yang saya berikan apakah dapat dijalankan dengan baik serta tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.” (Wawancara tanggal 23 April 2018)

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru PPKn Bapak Drs. Mohadi, M.Pd yang menyatakan :

“Sikap toleransi menjadi sikap yang penting dalam pendidikan demokrasi, dalam pembelajaranpun saya tak pernah lupa mengajarkan sikap tersebut kepada siswa, saya selalu menanamkan kepada siswa agar tidak pernah membedakan dalam berteman, kalau di kelaspun saya memperlakukan siswa saya semua sama tidak ada yang saya beda-

bedakan walaupun misalnya siswa A lebih pintar dari siswa B saya tidak pernah memandang seperti itu.” (Wawancara tanggal 3 Agustus 2018)

Sikap toleransi yang diajarkan guru dalam pembelajaran diharapkan dapat diterapkan jugadalam lingkungan masyarakat. Toleransi merupakan bagian terpenting dalam pendidikan demokrasi, karena adanya sikap ini maka siswa akan lebih menghargai perbedaan dan menghargaisiswa lain yang berbedadengan dirinya. Selain itu, ketika di masyarakat apabila siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat maka akan tercipta kehidupan yang demokratis di masyarakat.

Kerjasama juga merupakan salah satu sikap yang diajarkan oleh guru PPKn dalam proses pembelajaran. Dalam praktik pendidikan demokrasi, kerjasama ini menjadi hal yang penting untuk diajarkan dan juga sudah tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama proses belajar mengajar, guru telah mengajarkan sikap kerjasama dengan baik. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 25 April 2018 yakni saat sedang diskusi di dalam kelas, semua anggota kelompok mendapat tugas masing-masing tanpa ada yang terkecuali, masing-masing memiliki peran dan saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok agar cepat selesai.

Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan pada saat siswa sedang melakukan diskusi kelompok. Pada saat kegiatan diskusi siswa sudah menjalin kerjasama dengan baik antar anggota kelompoknya. Semua anggota kelompok saling bekerjasama untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Guru PPKn juga mendorong siswanya untuk saling bekerjasama dalam kegiatan pembelajaran terutama saat sedang diskusi kelompok. Semua siswa diharapkan memiliki peran masing-masing dalam kelompok. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan guru PPKn Bapak Drs. Moch. Malik yang menyatakan:

“Dalam pembelajaran saya sering menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, siswa saya suruh mengerjakan soal atau biasanya saya beri suatu permasalahan secara bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing yang dibentuk sendiri. Saya meminta selama diskusi siswa saling membagi tugas tanpa terkecuali. Dalam satu kelompok harus memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.”(Wawancara tanggal 23 April 2018)

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru PPKn Bapak Drs. Mohadi, M.Pd yang menyatakan bahwa :

“Kalau kerjasama itu sering saya tekankan pada saat diskusi, kalau diskusi kan menuntut siswa dalam kelompok itu untuk saling bekerjasama.Jadi kalau pas diskusi pasti saya selalu ingatkan untuk mengerjakan tugas kelompok itu secara bersama-

sama supaya lebih ringan dan cepat selesai juga.”(Wawancara tanggal 3 Agustus 2018)

Dan juga diperkuat dengan wawancara siswa yang bernama Rike Widyasari kelas X MIA 2 yang menyatakan :

“Guru sering memberikan tugas diskusi kelompok kepada kami dengan membagi kelompoknya masing-masing dan tiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing agar tugasnya cepat selesai.”(Wawancara tanggal 25 April 2018)

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa semua siswa sudah melaksanakan praktik pendidikan demokrasi yang berupa sikap kerjasama. Semua siswa menyadari akan peran masing-masing dalam kelompok karena mereka sudah bisa melakukan pembagian tugas dengan baik. Tidak ada siswa yang mendominasi atas temannya sendiri karena para siswa telah menyadari bahwa semuanya memiliki kedudukan dan hak yang sama. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan siswa yang bernama Aris Maulana kelas X MIA 2 yang menyatakan :

“Dalam kegiatan diskusi kan sudah dibagi tugasnya masing-masing, jadi kami dalam satu kelompok itu saling bekerjasama dan kami juga sudah menyadari peran kami masing-masing jadi tidak ada yang mendominasi karena kami kerjanya bareng-bareng semuanya sama-sama kerja.” (Wawancara tanggal 25 April 2018)

Jadi dapat dikatakan bahwa dalam proses pembelajaran siswa telah melaksanakan praktik pendidikan demokrasi dengan baik dengan membiasakan sikap kerjasama dalam pembelajaran. Hal ini juga tak lepas dari peran seorang guru yang selalu mendukung dan memberikan contoh kepada siswanya agar selalu menerapkan sikap kerjasama tidak hanya dalam proses pembelajaran namun juga di luar pembelajaran seperti di lingkungan masyarakat.



Bagan 1. Praktik Pendidikan Demokrasi dalam Kegiatan Pembelajaran

Praktik Pendidikan Demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Praktik pendidikan demokrasi selain dapat dilihat melalui kegiatan pembelajaran, juga dapat dilihat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler di dalamnya juga terdapat karakter yang akan

dikembangkan, sehingga dalam kegiatan ekstrakurikulerpun di dalamnya juga terdapat praktik pendidikan demokrasi sama halnya dengan kegiatan pembelajaran.

Kegiatan ekstrakurikuler menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh siswa SMAN 4 Bojonegoro terutama kelas X. Namun kegiatan ekstrakurikuler ini tidak harus diikuti seluruhnya, jadi siswa diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang diminati sesuai dengan keinginannya. Siswa diwajibkan mengikuti minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler dan maksimal 3 kegiatan ekstrakurikuler yang jadwalnya tidak sama. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Bojonegoro Bapak Drs. Soebintarto, MM yang menyatakan :

“Ketika masuk menjadi siswa kelas X baru maka sekolah akan mengenalkan beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Selanjutnya pihak sekolah memberikan kebebasan kepada siswanya untuk memilih minimal satu ekstrakurikuler yang ingin diikuti sesuai dengan bakat dan minatnya dan maksimal 3 ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini asal jadwalnya tidak ada yang sama.” (Wawancara tanggal 17 April 2018)

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilihat dalam penelitian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler olimpiade wawasan kebangsaan. Ekstrakurikuler wawasan kebangsaan ini masih berhubungan dengan pembelajaran PPKn, ekstra ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa mengikuti olimpiade wawasan kebangsaan yang selalu ada setiap tahunnya. Ekstra ini diikuti oleh siswa kelas X dan XI di sekolah ini. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini akan melihat praktik pendidikan demokrasi yang dilihat dari partisipasi, keadilan dan kesetaraannya.

Partisipasi yakni keikutsertaan siswa dalam suatu organisasi maupun kegiatan dengan tujuan tertentu. Partisipasi menjadi bagian terpenting dari pendidikan demokrasi. Dilihat dari partisipasinya, siswa yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler, dituntut untuk aktif mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh ekstrakurikuler tersebut. Anggota ekstrakurikuler ini berjumlah 10 orang yang memang dipersiapkan untuk olimpiade wawasan kebangsaan.

Dalam praktiknya, siswa yang tergabung dalam ekstra ini cenderung aktif, walaupun ada beberapa yang kurang aktif dikarenakan alasan tertentu. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh anggota ekstrakurikuler olimpiade WasBang yang bernama Dewangga Satria kelas XI IIS 3 menyatakan :

“ Kalau disini rata-rata semuanya aktif, kan anggotanya cuma ada 10 anak jadi rata-rata kalau ada kegiatan semuanya aktif. Walaupun juga ada satu dua yang kurang aktif, satunya karena lebih aktif di OSIS dan satunya karena anggota

Paskibra Kabupaten.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018)

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa anggota ekstra olimpiade ini rata-rata aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekstra. Walaupun ada yang kurang aktif karena alasan tertentu yang bisa dimaklumi. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Eka Ayu Rahmawati kelas X MIA 1 yang menyatakan :

“ Rata-rata siswa yang tergabung dalam ekstra ini aktif dalam mengikuti setiap kegiatan walaupun tidak ikut kegiatan pasti ijinnya juga jelas.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018)

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan tanggal 26 April 2018 yang menyatakan dari 10 anak anggota ekstra olimpiade WasBang, terdapat 1 anak yang tidak hadir mengikuti dikarenakan ijin ikut latihan Paskibra Kabupaten dan yang satunya telat karena ada kegiatan OSIS

Partisipasi anggota ekstrakurikuler tidak hanya ditunjukkan dengan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh ekstrakurikuler tersebut, Namun juga ditunjukkan ketika anggota ekstrakurikuler tersebut mampu mematuhi aturan yang telah disepakati oleh anggota ekstrakurikuler. Aturan yang ada dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut dibuat secara langsung dengan seluruh anggota ekstrakurikuler dan disepakati bersama para anggota. Oleh karena itu harus ditaati oleh semua yang tergabung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Waka Kesiswaan Bu Nanik Mubiyati, S. Pd., M.Pd yang menyatakan :

“ Seluruh anggota ekstrakurikuler disini harus mengikuti aturan yang disepakati oleh seluruh anggota ekstra karena aturan tersebut dibuat dan disepakati sendiri oleh anggota yang tergabung di dalamnya, dengan menaati aturan ini kan juga salah satu bentuk partisipasi terhadap ekstra yang diikuti.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Jadi seluruh anggota ekstrakurikuler harus turut berpartisipasi dalam menaati aturan tersebut demi tercapainya ketertiban dan tujuan dari adanya ekstrakurikuler tersebut. Selain itu, ketika ada suatu kegiatan yang diadakan oleh ekstrakurikuler maka anggota yang tergabung di dalamnya bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Hal ini juga merupakan bentuk dari partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dewangga Satria kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“ Setiap ada kegiatan ekstra maka dibutuhkan kerjasama dari seluruh anggotanya agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018)

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa tanpa adanya kerjasama dan partisipasi dari seluruh anggota, maka suatu kegiatan ekstrakurikuler juga tidak akan berjalan dengan lancar. Partisipasi anggota ekstrakurikuler juga

dapat ditunjukkan ketika ada musyawarah anggota, dalam musyawarah anggota ekstrakurikuler terlibat aktif di dalamnya. Namun anggota disini juga tidak sekedar hadir saja, namun juga menyampaikan pendapat maupun ide ketika bermusyawarah. Hal ini disampaikan oleh Bu Nanik Mubiyati, S. Pd., M. Pd yang mengatakan :

“ Dalam kegiatan ekstra juga ada kalanya mengadakan musyawarah anggota, melalui musyawarah anggota ini semua anggota ekstra dapat menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap ekstrakurikuler tersebut. Dalam forum diharapkan semua anggota ikut menyuarakan pendapatnya demi kemajuan ekstra tersebut.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Berdasarkan hal tersebut, ide atau pendapat dari masing-masing anggota ini sangat berperan dalam rangka pengembangan dan kemajuan ekstrakurikuler tersebut. Guru pembina ekstrakurikuler disini sangat mengedepankan proses pendidikan demokrasi serta hal ini dapat dijadikan pembelajaran bagi siswa. Guru pembina ekstrakurikuler juga selalu mendorong siswanya untuk selalu berpartisipasi dan turut aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh ekstrakurikuler yang diikuti.

Kegiatan ekstrakurikuler juga mengajarkan adanya keadilan bagi seluruh anggotanya. Guru pembina selalu memberikan contoh keadilan bagi seluruh anggotanya. Guru pembina disini memberikan pelayanan yang sama dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Guru pembina ekstrakurikuler disini tidak pernah membedakan antara ketua maupun anggota semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bu Nanik Mubiyati, S. Pd., M. Pd yang menyatakan :

“Saya selaku guru koordinator ekstrakurikuler disini selalu berpesan kepada seluruh pembina ekstra agar selalu bersikap adil kepada seluruh anggota ekstra. Semua siswa berhak mendapatkan keadilan yang sama disini.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari hal tersebut terlihat bahwa pembina sangat mendorong dan membiasakan anggotanya untuk selalu menerapkan keadilan. Keadilan juga terlihat saat semua anggota ekstrakurikuler yang melanggar aturan harus dikenakan hukuman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan tidak peduli apakah dia seorang ketua maupun anggota semua mendapat hukuman yang sama. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dewangga Satria kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“ Di ekstra sini kan ada juga yang namanya aturan yang telah disepakati bersama, semuanya wajib menaati aturan tersebut tidak peduli apakah dia seorang ketua ataupun anggota disini semuanya sama. Kalau ada yang salahpun harus dihukum sesuai dengan kesepakatan bersama.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018)

Hal ini terbukti tidak ada pendiskriminasian karena jabatan atau apapun semuanya tetap dianggap sama dan tidak ada yang lebih tinggi maupun mendominasi. Guru pembina selalu mengajarkan kedisiplinan bagi seluruh anggotanya, hal ini tidak hanya berlaku bagi seluruh anggota ekstrakurikuler namun juga ditaati oleh guru pembina ekstrakurikuler itu sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Eka Ayu Rahmawati kelas X MIA 1 yang menyatakan :

“Guru pembina ekstra disini sangat disiplin dan tepat waktu datangnya kalau ada kegiatan ekstra, justru kami yang para anggotanya ini yang malah sering telat.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018)

Berdasarkan hal tersebut baik siswa maupun guru pembina telah terbiasa melaksanakan keadilan. Selain itu, siswa disini juga tidak pernah membedakan dalam berteman dan apabila ada teman yang membutuhkan bantuan maka akan saling membantu tanpa pilih kasih atau memandang perbedaan yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Dewangga Satria kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“ Dalam memilih temanpun saya tidak pernah pilih-pilih dengan semuanya saya berteman baik dari kelas X maupun XI semuanya saya anggap teman kalau ada masalah ya kita saling membantu saja.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018)

Keadilan juga ditunjukkan dalam proses perekrutan anggota ekstra olimpiade WasBang ini, sebelum masuk ekstra ini terlebih dahulu ada proses seleksi yakni tes tulis yang diadakan oleh guru pembimbing ekstra. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pembimbing ekstra ini Bapak Drs. Moch. Malik yang menyatakan :

“ Anggota ekstra olimpiade Wawasan Kebangsaan ini sebelumnya sangat banyak, namun yang dibutuhkan untuk mengikuti lomba Wawasan Kebangsaan hanya 10 orang jadi untuk memilih 10 siswa ini dilakukan dengan tes tulis dan tes wawancara yang saya lakukan sendiri bersama Pak Muhadi selaku guru PPKn juga di sekolah ini.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018)

Sesuai hasil wawancara tersebut terlihat bahwa guru pembimbing ekstra olimpiade ini sangat mementingkan keadilan bagi seluruh siswanya dan memilih berdasarkan kemampuan masing-masing siswa tanpa ada pilih kasih atau diskriminasi.

Pendidikan demokrasi juga dapat dilihat saat siswa mampu menerapkan kesetaraan bagi seluruh siswa. Dilihat dari kesetaraan yang ada dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa anggota ekstrakurikuler mampu menghargai dan menghormati siswa lain yang berbeda baik agama maupun suku. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bu Nanik Mubiyati, S. Pd., M. Pd yang menyatakan :

“ Saya selalu menekankan kepada siswa agar selalu menghargai perbedaan yang ada di sekitar

kita. Di sekolah ini kan tidak semuanya beragama muslim ada juga yang non muslim namun kita sebagai guru tetap mengajarkan siswa agar selalu bersikap baik terhadap seluruh agama walaupun beda agama. Saya sebagai gurupun tidak pernah membedakan siswa satu dengan yang lainnya, yang saya terapkan itu pokoknya semua siswa itu berhak mendapatkan hak yang sama di sekolah.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa siswa disini sudah memahami akan adanya kesetaraan yang biasa terjadi di lingkungan sekitar. Mereka juga tidak pernah membedakan dalam hal memilih teman, semuanya menjadi teman baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sama maupun beda agamanya semua tetap berbaur menjadi satu. Sebagaimana dengan yang diungkapkan oleh Eka Ayu Rahmawati kelas X MIA 1 yang menyatakan :

“ Dalam memilih teman saya tidak pernah membedakan apakah dia berasal dari agama mana, apakah dia laki-laki atau perempuan, disini saya berteman dengan semuanya. Saya juga tidak pernah minder kalau berteman dengan siswa laki-laki atau bahkan kakak kelas.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018)

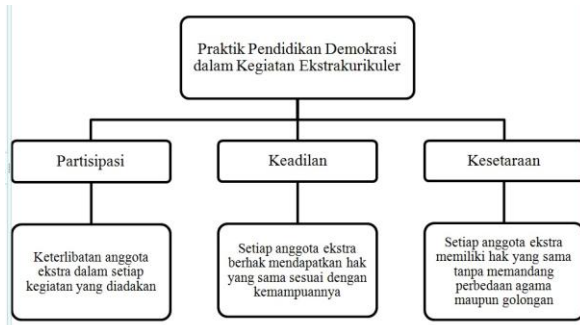
Selain itu, siswa anggota ekstrakurikuler juga selalu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota untuk menyampaikan ide maupun pendapatnya tanpa memandang apakah yang menyampaikan tersebut berasal dari agama yang sama ataupun berbeda semuanya diberikan hak dan kesempatan yang sama. Hal ini sebagaimana dengan yang diungkapkan oleh Dewangga Satria kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“ Disini semua siswa bebas mengutarakan pendapat yang ingin disampaikan, kami tidak pernah membatasi apabila ada yang ingin menyampaikan kritik atau saran terhadap ekstra ini. Semuanya saya berikan kebebasan seluas-luasnya tidak peduli apakah yang menyampaikan ini siswa laki-laki atau perempuan ataukah berasal dari agama mana semuanya memiliki kesempatan yang sama.” (Wawancara tanggal 4 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, walaupun seorang laki-laki tidak pernah mendiskriminasi teman yang perempuan. Termasuk dalam hal menyatakan pendapat, semuanya mendapat kesempatan yang sama tanpa memandang jenis kelamin ataupun agama. Para anggota ekstrakurikuler ini selalu mengedepankan sikap toleransi dalam hal apapun, termasuk ketika pendapatnya tidak sesuai dengan temannya atau tidak sesuai dengan hasil kesepakatan bersama, mereka tetap menerima dengan ikhlas. Karena perbedaan tersebut merupakan hal yang biasa terjadi.

Dapat dikatakan bahwa siswa anggota ekstrakurikuler disini terbiasa menerapkan praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini tak lepas dari

peran seorang guru yang selalu mendorong dan memberikan contoh secara langsung kepada siswanya. Guru pembina terbiasa membiasakan siswanya untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan pada pendidikan demokrasi. Dengan adanya pembiasaan inilah maka para siswa terbiasa untuk melaksanakan praktik pendidikan demokrasi tidak hanya dalam kegiatan ekstrakurikuler namun juga di luar kegiatan ekstrakurikuler.



Bagan 2. Praktik Pendidikan Demokrasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Praktik Pendidikan Demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dalam Kegiatan Intrakurikuler

Praktik pendidikan demokrasi melalui kegiatan intrakurikuler dapat dilihat melalui kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Di dalam kegiatan OSIS, OSIS merupakan suatu organisasi yang ada di sekolah yang dalam pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada praktik pendidikan demokrasi. Praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan OSIS, misalnya dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah serta menganggap perbedaan sebagai suatu hal yang wajar dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi OSIS ini dapat dijadikan wadah berdemokrasi bagi siswa.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pembina OSIS Bu Nanik Mubiyati, S. Pd., M. Pd yang menyatakan :

“ OSIS ini dapat dijadikan wadah belajar berorganisasi bagi peserta didik. Di OSIS ini juga siswa dapat belajar berdemokrasi di lingkungan sekolah.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa OSIS sangat penting dalam rangka pengembangan kemampuan siswa termasuk untuk belajar berdemokrasi selain melalui pembelajaran di kelas. Karena ketika siswa sudah belajar berorganisasi di sekolah maka ketika di masyarakat dia juga akan terbiasa menerapkan apa yang didapat dalam organisasi ketika di masyarakat. Praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan OSIS bisa dilihat dalam bentuk partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan, keadilan dan kesetaraan bagi seluruh anggota OSIS.

Dilihat dari partisipasinya, seluruh anggota OSIS disini memiliki partisipasi yang cukup tinggi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh OSIS. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan ketua OSIS yang bernama Trio Adi Pamungkas kelas XI MIA 1 yang menyatakan :

“ Semua anggota OSIS disini setiap ada kegiatan selalu ikut berpartisipasi karena mereka masuk di OSIS ini kan sudah diberikan amanah jadi mereka menjalankan amanah tersebut dengan baik walaupun ada yang tidak ikut pasti ada izinnnya.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa seluruh anggota OSIS memiliki partisipasi yang cukup tinggi dalam setiap kegiatan. Hal ini dikarenakan siswa yang tergabung dalam OSIS memiliki komitmen dan memegang amanah agar melaksanakan seluruh kegiatan dengan baik. Ketika ada siswa anggota OSIS yang tidak mengikuti kegiatan harus dengan izin yang jelas. Partisipasi siswa anggota OSIS tidak hanya dilihat dengan mengikuti setiap kegiatan OSIS. Sebelum mengadakan suatu kegiatan, terlebih dahulu seluruh anggota OSIS mengadakan musyawarah agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu anggota OSIS yang bernama Agnes Millendhya kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“ Setiap ada kegiatan pasti semua anggota OSIS ini lebih dulu mengadakan musyawarah misal untuk menentukan hari maupun tema kegiatan pasti ada musyawarah dulu. Musyawarah ini selain bertujuan untuk membahas suatu kegiatan agar bisa terlaksana dengan baik juga untuk mempererat antar anggota OSIS.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa musyawarah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh anggota OSIS sebelum maupun sesudah mengadakan suatu kegiatan. Dari hasil musyawarah tersebut akan muncul suatu hasil yang telah menjadi kesepakatan bersama para anggota OSIS. Dalam musyawarah tersebut, para anggota OSIS aktif berpartisipasi dalam mengemukakan ide maupun pendapat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua OSIS Trio Adi Pamungkas kelas XI MIA 1 yang menyatakan :

“ Setiap diadakan musyawarah anggota, sebagian besar anggota OSIS ini aktif dalam menyampaikan ide atau gagasannya sendiri-sendiri bahkan perbedaan pendapat itu biasa terjadi disini justru antusias mereka disini sangat tinggi. Dengan musyawarah inilah salah satu cara menyamakan pendapat yang berbeda.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari penuturan tersebut terlihat bahwa para anggota OSIS disini memiliki partisipasi dan antusias yang cukup tinggi dalam hal menyatakan pendapat demi kemajuan

bersama. Dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh OSIS, semuanya murni dari pemikiran siswa anggota OSIS tanpa ada campur tangan dari pembina OSIS. Hal ini sesuai dengan pendapat Pembina OSIS Bu Nanik Mubiyati, S. Pd., M. Pd yang menyatakan :

“ Saya sebagai pembina OSIS hanya bertugas mengawasi dan mengarahkan para anggota OSIS selanjutnya terserah bagaimana mereka dalam merancang dan melaksanakan suatu kegiatan, semuanya murni dari inisiatif para anggota OSIS itu.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dan diperkuat dengan pendapat Ketua OSIS Trio Adi Pamungkas kelas XI MIA 1 yang menyatakan :

“ Peran pembina OSIS disini hanya mengarahkan dan mengawasi saja, semua pelaksanaan kegiatan diserahkan seluruhnya pada anggota OSIS baru nanti kalau kiranya ada masalah dikonsultasikan dengan pembina. Jadi kalau boleh dibilang peran pembina itu hanya 20% dan selain itu murni dari kami sendiri.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa guru pembina OSIS hanya mengawasi dan mengarahkan seluruh kegiatan OSIS, sedangkan yang merancang dan melaksanakan adalah murni dari anggota OSIS itu sendiri. Hal ini berarti anggota OSIS disini memiliki peran dan partisipasi yang cukup bagus dalam setiap kegiatan. Dalam menyampaikan pendapatnya, seluruh anggota OSIS memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semuanya berhak mengutarakan ide untuk kelancaran dan kemajuan suatu kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh anggota OSIS yang bernama Agnes Millendhya kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“ Semua pengurus OSIS diberikan kebebasan untuk menyampaikan idenya masing-masing. Walaupun ada yang tidak setuju atau memiliki pendapat lain juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tetapi harus tetap saling menghargai pendapat dari teman yang lainnya.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa ketika suatu keputusan telah dihasilkan dalam suatu musyawarah maka semua anggota OSIS akan menerima keputusan tersebut dengan ikhlas. Untuk anggota OSIS yang pendapatnya tidak sesuai dengan keputusan yang dihasilkan, maka dia tetap membantu dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan profesional karena perbedaan pendapat tersebut sudah sering terjadi dan merupakan hal yang dianggap wajar oleh para anggota OSIS, tanpa adanya perbedaan justru suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan baik.

Partisipasi anggota OSIS, juga ditunjukkan ketika ada pemilihan ketua OSIS. Ketika ada pemilihan OSIS, seluruh anggota ikut berpartisipasi di dalamnya baik sebagai calon ketua OSIS maupun sebagai panitia

pelaksana. Dalam proses pemilihan ketua OSIS, tidak hanya siswa anggota OSIS saja yang ikut berpartisipasi namun seluruh siswa juga ikut berpartisipasi dalam menyuarakan hak pilihnya. Hal tersebut bisa dijadikan ajang berdemokrasi siswa namun dalam lingkungan yang lebih kecil yakni sekolah sebelum nanti merasakan proses demokrasi sesungguhnya dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan guru pembina Bu Nanik Mubiyati, S. Pd., M. Pd yang menyatakan bahwa :

“ Pemilihan ketua OSIS biasa terjadi satu tahun sekali pada bulan agustus, dengan adanya PILKETOS ini diharapkan seluruh siswa yang ada di sekolah tidak hanya pengurus OSIS mampu berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya. Kegiatan ini merupakan ajang berdemokrasi bagi siswa di sekolah.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dalam proses pemilihan ketua OSIS seluruh siswa yang ada di sekolah ini ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya. Siswa disini memiliki kesadaran untuk mengikuti proses pemilihan ketua OSIS tanpa ada paksaan dari guru maupun pihak lain. Selain itu, ada yang unik dari pemilihan ketua OSIS di sekolah ini, yakni setiap tahun dalam pemilihan ketua OSIS selalu memiliki tema-tema yang berbeda seperti tahun kemarin dengan tema kebudayaan, jadi seluruh panitia termasuk calon ketua OSIS mengenakan pakaian adat saat proses pemilihan ketua OSIS. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua OSIS Trio Adi Pamungkas kelas XI MIA 1 yang menyatakan :

“ Dalam setiap pemilihan ketua OSIS tiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda seperti tahun kemarin dengan tema kebudayaan. Tema ini tidak hanya sekedar tema namun benar-benar dilaksanakan maksudnya ketika proses pemilihan ketua OSIS seluruh panitia mengenakan pakaian adat yang berbeda-beda dan ini murni dari ide para pengurus OSIS bahkan gurupun tidak mengetahui hal ini baru pas acara guru begitu menghargai kreativitas para pengurus OSIS.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari penuturan tersebut terlihat bahwa seluruh anggota OSIS memiliki loyalitas yang cukup tinggi ketika menjadi anggota OSIS. Praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan OSIS, tidak hanya dilihat melalui partisipasinya namun juga bisa dilihat apakah terdapat keadilan dalam kegiatan OSIS.

Keadilan dalam kegiatan OSIS ditunjukkan dengan semua siswa anggota OSIS memiliki peran dan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Karena sebelum menjadi anggota OSIS, semua siswa yang mencalonkan menjadi anggota OSIS terlebih dahulu melaksanakan tes bakat minat. Hal ini sependapat dengan ketua OSIS Trio Adi Pamungkas kelas XI MIA 1 yang menyatakan bahwa :

“Perekrutan calon pengurus OSIS ini dilaksanakan melalui beberapa tes ada tes tulis, tes wawancara, dan tes bakat minat yang dilakukan oleh pengurus OSIS periode sebelumnya. Jadi proses perekrutan anggota ini dilakukan seadil-adilnya sesuai dengan keahlian masing-masing kan ada tes bakat minat juga.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari pendapat tersebut jelas bahwa pembagian peran dan tugas disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing sehingga menerapkan prinsip keadilan seperti yang ada pada pendidikan demokrasi. Selain itu, ketua disini juga memiliki peran dan tanggung jawab sendiri, ketua OSIS disini tidak hanya bisa menyuruh saja namun juga mau melaksanakan kegiatan bersama dengan anggotanya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pengurus OSIS Agnes Millendhya kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“Disini semua pengurus OSIS saling bekerjasama dalam setiap kegiatan, semua pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ketua OSISpun juga ikut turun tangan langsung membantu anggotanya tanpa membedakan dan tidak hanya bisa menyuruh saja.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari penuturan tersebut terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara ketua dan anggota, semuanya tetap bekerjasama dalam melaksanakan suatu kegiatan. Keadilan juga ditunjukkan ketika pemilihan bakal calon ketua OSIS, bakal calon ketua OSIS ini dipilih berdasarkan serangkaian tes dan tidak ditunjuk secara langsung oleh guru. Hal ini dilakukan guru pembina untuk menerapkan keadilan kepada seluruh anggota OSIS. Termasuk dalam hal perekrutan anggotanya juga dilakukan dengan menerapkan keadilan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pembina OSIS Bu Nanik Mubiyati, S. Pd., M. Pd yang menyatakan :

“Pemilihan calon ketua OSIS disini tidak ditunjuk langsung dari dewan guru melainkan melalui berbagai tes yang harus dilewati oleh seluruh anggota OSIS tanpa terkecuali yakni ada tes tulis dan wawancara. Dengan melalui tes ini diharapkan nantinya terpilih ketua OSIS yang benar-benar sesuai dengan kemampuannya dan memang layak menjadi ketua OSIS.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Pemilihan bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS dipilih setelah melakukan tes tulis dan tes wawancara yang diadakan oleh guru pembina OSIS. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua OSIS yang bernama Trio Adi Pamungkas kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“Pemilihan calon ketua OSIS dilakukan setelah melewati beberapa tes seperti tes tulis dan wawancara. Semua pengurus OSIS berhak mengikuti tes yang diadakan langsung oleh sekolah, tahap pertama yakni tes tulis yang diikuti

oleh seluruh pengurus OSIS kemudian akan dipilih beberapa pasang calon berdasarkan hasil tes tulis untuk kemudian mengikuti tes wawancara yang diwawancarai langsung oleh Kepala Sekolah, Waka dan guru pembina. Selanjutnya akan terpilih beberapa pasang calon yang kemudian akan menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS yang dipilih langsung oleh seluruh siswa di sekolah ini.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa guru pembina OSIS sangat mengedepankan keadilan bagi seluruh anggota OSIS. Calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS dipilih berdasarkan kemampuannya masing-masing yang selanjutnya akan dipilih secara langsung oleh seluruh siswa yang ada di SMAN 4 Bojonegoro secara langsung. Seluruh siswa memiliki antusias yang baik dalam menyuarakan hak pilihnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Agnes Millendhya kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“Dalam proses pemilihan ketua OSIS semua siswa yang ada di sekolah ini ikut berpartisipasi di dalamnya tidak hanya pengurus OSIS saja. Semua siswa menggunakan hak pilihnya masing-masing sesuai keinginannya untuk memilih calon ketua OSIS pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan kegiatan OSIS di dalamnya telah mengedepankan adanya keadilan bagi seluruh anggota OSIS. Guru pembina juga selalu mengawasi agar pelaksanaan kegiatan OSIS ini dijalankan berdasarkan pendidikan demokrasi.

Praktik pendidikan demokrasi ini juga ditunjukkan dengan melaksanakan kesetaraan bagi seluruh anggota OSIS. Anggota OSIS sudah mampu menghargai dan menghormati anggota lain yang berbeda suku maupun agama. Termasuk dalam hal menyatakan pendapat, anggota OSIS ini tidak pernah mendiskriminasi maupun tidak memberikan kesempatan anggota lain yang ingin menyatakan pendapat walaupun berbeda agama. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua OSIS Trio Adi Pamungkas yang menyatakan :

“Semua pengurus OSIS disini memiliki kesempatan yang sama kalau ingin menyampaikan pendapatnya tanpa membedakan agamanya semuanya memiliki hak yang sama dalam menyatakan kritik dan sarannya masing-masing.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

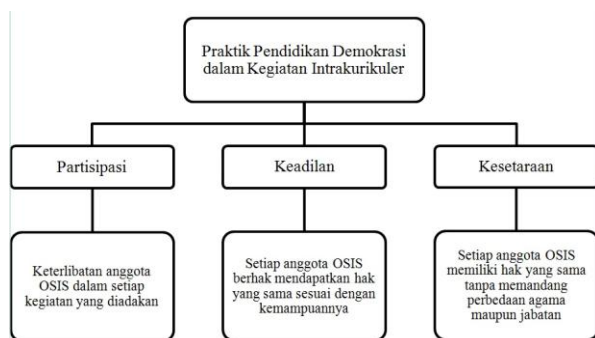
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa semua anggota memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama dalam menyampaikan pendapat tanpa pandang suku maupun agama. Selain itu, seluruh anggota OSIS juga tidak membedakan dalam memilih teman walaupun berbeda agama tetap saling berteman dan bekerja sama satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Agnes Millendhya kelas XI IIS 1 yang menyatakan :

“ Semua pengurus OSIS disini tidak pernah memilih-milih dalam berteman, ketika di dalam kelas pun kami berteman dengan semuanya tidak memandang bahwa saya anggota OSIS merasa lebih tinggi dari teman lainnya. Semuanya tetap saya anggap sama.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Berdasarkan hal tersebut anggota OSIS tidak pernah merasa lebih tinggi dengan temannya yang ada di kelas walaupun mereka bukan anggota OSIS, mereka tetap berbaur dengan semua teman. Mereka berteman tanpa membedakan status maupun agama. Seorang ketua OSIS disini juga tidak pernah memihak salah satu anggota, ketika ada perbedaan pendapat justru peran ketua OSIS disini sebagai penengah. Hal ini disampaikan oleh Ketua OSIS Trio Adi Pamungkas yang menyatakan :

“ Kalau perbedaan pendapat disini pasti ada namun saya sebagai ketua OSIS tidak pernah merasa paling benar, saya menerima semua pendapat dari teman pengurus tetapi juga tidak pernah memihak pada salah satu pendapat. Saya disini hanya sebagai penengah saat ada perbedaan pendapat untuk keputusan saya serahkan lagi kepada pengurus lainnya.” (Wawancara tanggal 3 Mei 2018)

Berdasarkan hal diatas, seluruh anggota OSIS telah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan demokrasi dalam setiap kegiatan yang dijalankan oleh OSIS. Dilihat dari partisipasinya, keadilan dan kesetaraan, anggota OSIS telah melaksanakan ketiga komponen tersebut dengan cukup baik walaupun tanpa selalu diarahkan oleh guru pembina. Justru peran guru pembina disini hanyalah mengawasi dan mengarahkan siswa tanpa ikut campur lebih jauh dalam melaksanakan kegiatan. Jadi siswa OSIS disini sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam melaksanakan setiap kegiatan apalagi dalam hal partisipasinya yang cukup tinggi dalam setiap kegiatan.



Bagan 3. Praktik Pendidikan Demokrasi dalam Kegiatan Intrakurikuler

Pembahasan

Pendidikan merupakan sarana untuk mentransferkan ilmu pengetahuan. Pendidikan diharapkan dapat

mengembangkan karakter yang dimiliki oleh siswa termasuk karakter yang berhubungan dengan pendidikan demokrasi. Dengan adanya pendidikan demokrasi maka diharapkan siswa dapat dibentuk menjadi pribadi yang lebih demokratis sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah. Pendidikan demokrasi di sekolah tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, namun juga di luar pembelajaran seperti kegiatan sekolah yakni kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler. Pendidikan demokrasi yang ada di sekolah ini tidak hanya tentang materi dan teori pembelajaran namun juga melalui praktik nyata kehidupan sehari-hari di sekolah. Di sekolah, siswa juga diajarkan untuk melaksanakan praktik pendidikan demokrasi seperti di kehidupan yang nyata seperti dalam lingkungan masyarakat. Jadi sekolah ini dijadikan wadah belajar berdemokrasi bagi siswa yang dikembangkan melalui pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler.

Pendidikan demokrasi tidak hanya diartikan dengan proses pemilihan umum seperti yang kebanyakan dipahami oleh masyarakat umum. Namun pendidikan demokrasi dalam arti yang lebih sempit dapat diartikan sebagai nilai atau sikap hidup yang dianut oleh seorang individu. Dalam lingkungan sekolah, pendidikan demokrasi diajarkan kepada siswa agar siswa memiliki sikap yang dapat dijadikan panutan ketika terjun di masyarakat. Sikap-sikap yang diajarkan di sekolah ini merupakan bagian dari sikap yang dianut dalam pendidikan demokrasi.

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini membahas tentang konstruksi sosial yang ada di masyarakat, dimana individu dalam masyarakat itu tidak dapat terbentuk begitu saja melainkan melalui tindakan dan proses interaksi sosial. Hal ini sama dengan di sekolah, bahwa untuk membentuk individu/siswa di lingkungan sekolah diperlukan tindakan dan interaksi sosial secara terus menerus, sedangkan sekolah merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Dalam teori konstruksi sosial, terdapat tiga “*moment*” simultan yakni eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

Eksternalisasi, merupakan penyesuaian diri dengan lingkungan sebagai produk manusia. Eksternalisasi ini merupakan tahap yang sangat mendasar dalam teori konstruksi sosial, seorang manusia yang hidup dalam masyarakat tidak akan terpisah dari masyarakat dimana dia tinggal. Sejak awal manusia itu tumbuh telah terikat dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini sama halnya dengan di lingkungan sekolah karena sekolah merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri atau bisa dikatakan bahwa sekolah merupakan masyarakat kecil. Jadi apa yang ada di masyarakat itu juga ada di sekolah dan siswa dapat belajar kehidupan di sekolah sebagai bekal nanti di masyarakat.

Tahap eksternalisasi di sekolah yakni adanya aturan yang dibuat oleh sekolah dan kegiatan pembiasaan yang dilakukan sekolah kepada siswanya. Sekolah memiliki aturan yang harus ditaati oleh seluruh siswanya. Aturan ini dibuat sendiri oleh warga sekolah melalui kesepakatan bersama sehingga harus ditaati oleh seluruh warga sekolah yang ada di dalamnya.

Dalam praktik pendidikan demokrasi, sebelum siswa menerapkan praktik pendidikan demokrasi terlebih dahulu akan dibuat suatu aturan oleh gurunya agar siswanya mampu menerapkan praktik pendidikan demokrasi tersebut. Misalnya dalam pembelajaran guru membuat suatu aturan agar siswanya melaksanakan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran. Pertama guru akan memberikan pengetahuan kepada siswanya tentang apa itu pendidikan demokrasi. Setelah siswanya memahami apa yang disampaikan oleh guru maka guru akan memberikan contoh secara langsung kepada siswa tentang praktik pendidikan demokrasi secara langsung dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pengetahuan, aturan dan pembiasaan tentang praktik pendidikan demokrasi ini maka siswa akan mulai memahami apa yang telah disampaikan oleh guru.

Hal tersebut juga berlaku pada kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler guru pembina ekstrakurikuler juga menerapkan aturan dan kegiatan pembiasaan yang harus ditaati oleh seluruh anggota ekstrakurikuler. Walaupun aturan tersebut tidak tertulis namun disampaikan secara langsung saat awal kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler yakni OSIS, juga terdapat adanya aturan yang harus ditaati oleh anggota OSIS baik itu aturan secara umum maupun spesifik ke pendidikan demokrasi namun juga tidak tertulis. Aturan yang ada pada tahap eksternalisasi ini dibuat sendiri oleh warga sekolah namun aturan tentang praktik pendidikan demokrasi ini tidak tertulis secara langsung namun disosialisasikan baik oleh guru pembelajaran maupun guru pembina kegiatan. Jadi pada tahap eksternalisasi ini guru akan melakukan pembiasaan kepada siswanya agar terbiasa melaksanakan praktik pendidikan demokrasi di sekolah.

Obyektivasi merupakan masyarakat sebagai kenyataan yang objektif, dimana seorang individu akan melihat suatu produk atau individu lain sebagai objek yang dapat dilihat. Individu melakukan obyektivasi terhadap produk sosial, baik penciptanya maupun individu lain. Aturan yang menjadi produk dari tahap eksternalisasi harus disampaikan kepada siswa namun dalam penyampaiannya tidak harus secara langsung melalui tatap muka namun bisa melalui penyebaran opini misalnya dari mulut ke mulut tanpa harus si pembuat aturan ini terjun langsung menyampaikan kepada siswa. Adanya aturan ini akan

menciptakan kesadaran dan keyakinan bahwa apa yang telah diatur tersebut merupakan tindakan yang positif dan harus ditaati. Adanya kesadaran dan keyakinan dalam diri siswa ini merupakan bagian dari tahap obyektivasi.

Dalam proses pembelajaran, guru telah memberikan pengetahuan tentang pendidikan demokrasi kepada siswanya. Siswa akan melihat guru sebagai objek dalam melaksanakan praktik pendidikan demokrasi, dengan melihat guru sebagai objek diharapkan akan muncul kesadaran dalam diri siswa untuk menerapkan praktik pendidikan demokrasi di sekolah. Setelah diberikan pengetahuan dan contoh tentang pendidikan demokrasi maka siswa akan memiliki kesadaran dan keyakinan akan pentingnya pendidikan demokrasi di sekolah. Kesadaran dan keyakinan siswa akan pentingnya melaksanakan praktik pendidikan demokrasi inilah merupakan bagian dari tahap obyektivasi.

Hal ini juga berlaku dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, setelah guru pembina memberikan aturan kepada siswanya, maka ketika siswa sudah mulai menyadari akan pentingnya melaksanakan praktik pendidikan demokrasi maka hal tersebut sudah sampai pada tahap obyektivasi. Jadi pada tahap ini, guru akan menjadi objek yang dilihat oleh siswa dalam melaksanakan praktik pendidikan demokrasi karena dengan melihat guru secara langsung maka akan timbul kesadaran dari dalam diri siswa untuk melaksanakan praktik pendidikan demokrasi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh guru.

Internalisasi, merupakan proses dimana individu mengidentifikasi dirinya sesuai dengan apa yang telah dilihatnya. Setelah terjadi tahap eksternalisasi dan obyektivasi, maka yang terakhir akan terjadi tahap penginternalisasian suatu objek ke dalam diri seseorang. Setelah adanya aturan dan pembiasaan untuk melaksanakan pentingnya pendidikan demokrasi, maka siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan pentingnya praktik pendidikan demokrasi di sekolah. Setelah memiliki kesadaran, maka siswa akan menginternalisasikan pendidikan demokrasi itu dalam dirinya dengan cara melaksanakan praktik pendidikan demokrasi tersebut baik dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Jadi untuk mendorong siswa melakukan praktik pendidikan demokrasi perlu dilakukan beberapa tahap agar siswa ini menganggap penting adanya pendidikan demokrasi tersebut. Jadi pada tahap internalisasi ini siswa sudah mampu melaksanakan praktik pendidikan demokrasi di sekolah sesuai dengan apa yang telah dibiasakan dan dicontohkan oleh guru.

Tiga proses dalam konstruksi sosial sesuai dengan penelitian ini yakni melalui tahap eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Di lingkungan sekolah

eksternalisasi yakni adanya aturan dan kegiatan pembiasaan di sekolah yang berkaitan dengan praktik pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian tahap obyektivasi yaitu guru menjadi obyek yang dilihat oleh siswa dalam melaksanakan praktik pendidikan demokrasi di sekolah, setelah itu diharapkan akan muncul kesadaran dan keyakinan bahwa aturan sekolah dan pembiasaan tentang praktik pendidikan demokrasi merupakan tindakan yang positif untuk terciptanya keteraturan dan ketertiban di sekolah. Terakhir, internalisasi yakni siswa menginternalisasikan aturan sekolah dalam dirinya dengan melaksanakan aturan tersebut, yakni siswa sudah mampu melaksanakan praktik pendidikan demokrasi dengan baik tanpa harus selalu dicontohkan oleh guru. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi siswa yang cukup baik dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, serta siswa sudah mampu menerapkan keadilan dan kesetaraan dengan cara menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda baik suku maupun agama tanpa mendiskriminasi. Jadi untuk membentuk individu/siswa agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah, maka diperlukan tiga proses yang ada dalam teori konstruksi sosial tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik pendidikan demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dalam membentuk warga negara yang demokratis maka dapat disimpulkan hasil penelitian yakni, praktik pendidikan demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler. Praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan pembelajaran PPKn dapat dilihat melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn Kelas X Semester 2 tentang Wawasan Nusantara di dalamnya telah mencantumkan nilai-nilai pendidikan demokrasi diantaranya peduli, ramah, toleransi dan kerjasama. Namun ada juga nilai yang tidak tercantum dalam RPP tetapi diajarkan oleh guru PPKn yakni kebebasan seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berkelompok.

Praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan sekolah dapat dilihat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilihat dalam ekstrakurikuler olimpiade wawasan kebangsaan sedangkan kegiatan intrakurikuler dapat dilihat pada kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan sekolah ini dilihat dari partisipasi, keadilan dan kesetaraan. Partisipasi ditunjukkan dengan siswa aktif mengikuti seluruh

kegiatan yang diadakan dengan baik dan aktif menyampaikan pendapat dalam setiap kegiatan. Keadilan ditunjukkan dengan proses perekrutan anggota yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan pembagian peran sesuai dengan keahlian masing-masing anggota. Kesetaraan ditunjukkan dengan siswa tidak membedakan dalam memilih teman berdasarkan agama ataupun golongan semuanya memiliki hak yang sama termasuk dalam menyampaikan pendapat.

Praktik pendidikan demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini tidak lepas dari peran guru yang selalu mendukung dan membimbing siswanya untuk selalu menerapkan pendidikan demokrasi tidak hanya di lingkungan sekolah melainkan guru juga mendorong agar siswa nanti ketika terjun di masyarakat dapat menjadi warga negara yang demokratis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang praktik pendidikan demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro dalam membentuk warga negara yang demokratis maka dapat diberikan saran sesuai dengan hasil penelitian yakni guru hendaknya menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi agar dapat membuat siswa lebih aktif di kelas, memberi apresiasi kepada siswa yang aktif dan untuk siswa yang kurang aktif hendaknya guru selalu mendorong dan memotivasi siswa agar lebih aktif, menunjuk secara langsung siswa yang kurang aktif di kelas agar praktik pendidikan demokrasi di sekolah ini dapat berjalan lebih maksimal. Kemudian untuk siswa agar lebih disiplin dalam mengatur waktu, serta banyak melakukan kegiatan secara kelompok agar dapat berinteraksi dengan semua teman, mampu menyeimbangkan belajar dan berorganisasi di sekolah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Muthoharoh, Hazhu. 2013. *SMAPA Gelar Pemilihan OSIS Ala Pilgub*, (Online), <http://blokbojonegoro.com/v2/berita/bb-gts/20075-smapa-gelar-pemilihan-osis-ala-pilgub.html>, diakses 9 November 2017
- Nastiti, Harmita Dian. 2016. Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah Di SMA Khadijah Surabaya. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol 01(04). 282-297. Dapat diakses di <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/14426>
- Zamroni. 2013. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur. Yogyakarta :Penerbit Ombak.